

Catatan atas Laporan Keuangan

2021

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

> Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Panembahan Senopati Palbapang Bantul elp/Fax: (0274) 367310 | Email: dinas.pupkp@bantulkab.go.id Website: dpupkp.bantulkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 31 Desember 2021

Kepala

BOBOT ARIFFI'AIDIN, ST., MT.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19690619 199603 1 003

DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDUL | i |
|--|-----|
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN | 3 |
| Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kaw Permukiman | |
| BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PR PENCAPAIAN TARGET KINERJA | |
| Ekonomi Makro | 12 |
| Kebijakan Keuangan | 12 |
| Program Pencapaian Target Kinerja | 12 |
| Pengakuan Pendapatan dan Belanja | 13 |
| Pengakuan Aset | 14 |
| Pengakuan Kewajiban | 14 |
| Penilaian Aset | 14 |
| BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 15 |
| Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan | 15 |
| Pendapatan Daerah | 16 |
| Belanja Daerah | 17 |
| BAB IV. POS-POS NERACA | 20 |
| Aset | 20 |
| Kewajiban | 22 |
| Ekuitas Dana | 23 |
| BAB V. PENUTUP | 25 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer | ah |
|---|----|
| pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2021 | 15 |
| Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPk | (P |
| Tahun Anggaran 2021 | 15 |
| Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 | 16 |
| Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 | 17 |
| Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2020 dan 2021 | 21 |
| Tabel 6. Data Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Cinomati | 22 |
| Tabel 7. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2020 - 2021 | 24 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul. 4

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keuangan Umum Penyusunan Laporan Dinas Pekerjaan Perumahan Dan Kawasan PermukimanKabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruhtransaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan anggaran secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokaskan dan apakah generasi yang akan

- datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Mengevaluasi kinerja, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN

Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

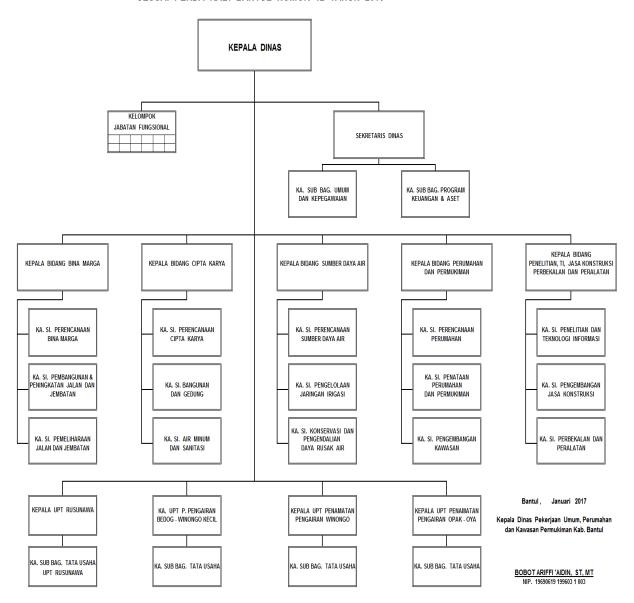
Dasar hukum pendirian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalahsebagai berikut:

- a. KepalaDinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL SESUAI PERDA KAB. BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Sumber: Perbup Nomor 110 Tahun 2016

Sedangkan tugas dan fungsimasing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP.Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana,hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- 4. Pengelolaan barang milik daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP;
- 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPKP;
- 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang binamarga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;

- 2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
- 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
- 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
- 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Cipta Karya.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- Perumusankebijakanbidangperencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
- Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;

- 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sumberdaya air.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- Perumusan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
- Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
- 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan.

Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian, teknologi informasi jasa konstruksi, perbekalan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- Perumusan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
- Pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
- 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
- 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- 2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
- 3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
- 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;dan
- 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 2 UPT yaitu:

 UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 136 tahun 2017.

Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman.Susunan organisasi UPT terdir idari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi :

- 1. penyusunan rencana kerja UPT;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
- 3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
- pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsiUPT ; dan
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati nomor 137 tahun 2017.

Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan.

UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas :

- a. UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil;
- b. UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- c. UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana kerja UPT;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
- 3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
- 4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;

- 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam upaya menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.

Landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. DPA Nomor: DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.00/001/2021 tanggal 4 Januari 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja (SKPD) No. DPPA No perangkat Daerah DPPA/B.1/1.03.1.04.0.00.01.00/001/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Adanya landasan hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman memudahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sector riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 12 program dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 6. Program Pengembangan Permukiman
- 7. Program Penataan Bangunan Gedung
- 8. Program Penyelenggaraan Jalan
- 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 10. Program Pengembangan Perumahan
- 11. Program Kawasan Permukiman
- 12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekeriaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 berdasarkan Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual (Cash Towards Accrual) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual merupakan basis akuntansi dimana basis kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset dan entitas dalam neraca. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul. Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang PFK.

Penilaian Aset

Aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yag sudah dimiliki pada saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Laporan Realisasi menggambarkan perbandingan antara daftar isian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2021 dengan realisasinya, yang mencakup pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari – 31 Desember 2021.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) |
|----|-------------------|-------------------|
| 1 | Pendapatan | 3.427.592.500 |
| 2 | Belanja Operasi | 46.462.288.634 |
| 3 | Belanja Modal | 119.452.807.047 |
| | Surplus/(Defisit) | (162.487.503.181) |

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 secara keseluruhan seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) | | % |
|----|--|------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3x100) |
| 1 | Pendapatan | 3.427.592.500 | 3.134.984.776 | 91,46 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 3.427.592.500 | 3.134.984.776 | 91,46 |
| | - Pendapatan Retribusi Daerah | 3.427.592.500 | 3.125.660.486 | 91,19 |
| | - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 0,00 | 9.324.290 | |
| | | | | |
| 2 | Belanja | 165.915.095.681 | 155.354.457.346 | 93,63 |
| | Belanja Operasi | 46.462.288.634 | 43.816.130.488 | 94,30 |
| | Belanja Modal | 119.452.807.047 | 111.538.326.858 | 93,37 |
| | Surplus/(Defisit) | (162.487.503.181) | (152.219.472.570) | 93,68 |

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.134.984.776 (91,46%) atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 3.427.592.500 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, target dan realisasi PAD seperti Tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian Pendapatan | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % |
|----|--|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3x 100) |
| 1 | Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus | 21.602.500 | 21.857.500 | 101,18 |
| 2 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair | 112.200.000 | 138.288.300 | 123,25 |
| 3 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.079.790.000 | 1.573.483.500 | 145,89 |
| 4 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor | 9.000.000 | 14.960.000 | 166,22 |
| 5 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 2.205.000.000 | 1.377.071.186 | 62,45 |
| 6 | Fasilitas Sosial | 0 | 0 | - |
| 7 | Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair | 0 | 125.790 | - |
| 8 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0 | 9.198.500 | - |
| 9 | Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa | 0 | 0 | - |
| | Total | 3.427.592.500 | 3.134.984.776 | 91,46 |

Belanja Daerah

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 155.354.457.346 (93,63%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp.10.560.638.335 yang dirinci dalam program-program sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

| NO | URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|--|----------------|----------------|-------|
| | | | | |
| | BELANJA DAERAH | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.056.863.500 | 13.956.595.854 | 92,69 |
| | Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 711.495.220 | 686.509.840 | 96,49 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.943.237.536 | 10.256.621.855 | 93,73 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.104.912.000 | 947.043.294 | 85,71 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 870.503.670 | 819.025.900 | 94,09 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.426.715.074 | 1.247.394.965 | 87,43 |
| 2 | Program Pengelolaan SUMBER DAYA AIR (SDA) | 20.020.532.616 | 18.834.014.545 | 94,07 |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan pengamatan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.358.644.099 | 6.875.493.800 | 93,43 |
| | Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 HA Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12.661.888.517 | 11.958.520.745 | 94,45 |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 10.046.943.240 | 9.785.308.240 | 97,40 |
| | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota | 10.046.943.240 | 9.785.308.240 | 97,40 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|---|----------------|----------------|-------|
| 4 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 5.218.853.250 | 5.144.623.000 | 98,58 |
| | Pengelolaan Dan Pengembangan system Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.218.853.250 | 5.144.623.000 | 98,58 |
| 5 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 3.262.138.165 | 3.137.190.000 | 96,17 |
| | Pengelolaan Dan Pengembangan System Drainase Yang Terhubung langsung Dengan Sungai dalam daerah kabupaten/Kota | 3.262.138.165 | 3.137.190.000 | 96,17 |
| 6 | Program Pengembangan Permukiman | 13.752.079.480 | 13.418.193.259 | 97,57 |
| | Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 13.752.079.480 | 13.418.193.259 | 97,57 |
| 7 | Program Penataan Bangunan Gedung | | | 96,90 |
| | Penyelengaraan Bangunan Gedung Di Wilayah daerah kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung | 10.228.431.254 | 9.911.557.360 | 96,90 |
| 8 | Program Penyelenggaraan Jalan | 82.128.407.747 | 75.279.884.233 | 91,66 |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 82.128.407.747 | 75.279.884.233 | 91,66 |
| 9 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 718.564.840 | 633.266.580 | 88,13 |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 492.205.120 | 437.993.620 | 88,99 |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 226.359.720 | 195.272.960 | 86,27 |
| 10 | Program Pengembangan Perumahan | 2.616.111.589 | 2.463.446.775 | 94,16 |
| | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan / Atau Rumah Khusus | 2.333.966.349 | 2.186.513.135 | 93,68 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|--|-----------------|-----------------|-------|
| | Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan | 282.145.240 | 276.933.640 | 98,15 |
| 11 | Program Kawasan Permukiman | 2.866.170.000 | 2.790.377.500 | 97,36 |
| | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) HA | 2.866.170.000 | 2.790.377.500 | 97,36 |
| 12 | Program peningkatan Prasarana, sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | - | - | - |
| | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | - | - | - |
| | JUMLAH | 165.915.095.681 | 155.354.457.346 | 93,63 |

BAB IV. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Data aset pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 seperti pada Tabel 4.

Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2020 dan 2021

| No. | Aset | 2021 | 2020 |
|-------|---|------------------------|------------------------|
| Α | Aset Lancar | | |
| 1 | Kas | 0,00 | 5.563.500,00 |
| 2 | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Piutang | 95.220.930,85 | 44.233.795,67 |
| 4 | Piutang Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Persediaan | 17.163.840.653,11 | 12.138.720.603,11 |
| 6 | Penyisihan Piutang | 0,00 | (25.241.094,18) |
| 7 | Beban Dibayar Dimuka | 123.751.427,13 | 237.383.156,40 |
| Jumla | ah Aset Lancar | 17.382.813.011,09 | 12.425.901.055,18 |
| | | | |
| В | Aset Tetap | | |
| 1 | Tanah | 408.358.704.950,00 | 408.358.704.950,00 |
| 2 | Peralatan Dan Mesin | 14.894.950.333,00 | 14.371.446.937,00 |
| 3 | Gedung dan bangunan | 110.062.016.346,00 | 104.443.834.636,35 |
| 4 | Jalan, irigasi, dan instalasi | 2.281.529.758.595,44 | 2.166.613.767.161,44 |
| 5 | Aset tetap lainnya | 313.986.357,00 | 313.743.500,00 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (1,646.057.067.885,64) | (1.555.600.562.823,68) |
| Jumla | ah Aset Tetap | 1.169.102.348.695,80 | 1.138.500.934.361,11 |
| | | | |
| С | Aset Lainnya | | |
| 1 | Aset tidak berwujud | 14.214.489.916,20 | 4.828.761.674,40 |
| 2 | Aset lain yang dibatasi penggunaannya | 180.050.000,00 | 198.200.000,00 |
| 3 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (8.378.137.089,80) | (4.655.284.318,60) |
| Jumla | ah Aset Lain | 14.394.539.916,20 | 5.026.961.674,40 |
| | | | |
| Jumla | ah Aset | 1.200.879.701.623,09 | 1.155.953.797.090,69 |

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat Belanja Modal Tanah yaitu Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.17.455.500.000,00 terealisasi Rp.11.931.752.613,00 Belanja ini diperuntukkan untuk biaya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pelebaran Jalan Cino Mati.

Proses pengadaan tanah dilakukan melalui proses pentahapan di mana tahun 2021 ini dilaksanakan tahap pelaksanaan dengan keluaran berupa pembayaran ganti rugi tanah sebanyak 85 bidang dengan total nilai pembebasan tanah sebesar Rp.11.617.296.500,00. Rincian pembebasan tanah untuk pelebaran Jalan Cinomati seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Cinomati

| | Kalurahan | | | Belum Dibayar | | Pembayaran | | |
|----|-----------|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------------|
| No | | Jenis Lahan | Jumlah Bidang | Luas | Nilai (Rp) | Jumlah Bidang | Luas | Nilai (Rp) |
| 1 | Terong | Tanah Warga | | | | 28 | 6.020 | 3.931.096.100 |
| | | Tanah Kehutanan | 3 | 6.207 | 2.458.128.200 | | | |
| | | Tanah Enklave | 7 | 7.418 | 3.765.919.300 | | | |
| 2 | Wonolelo | Tanah Warga | 1 | 391 | 172.149.900 | 57 | 14.060 | 7.686.200.400 |
| | | Tanah Oo | 2 | 2.130 | 1.235.046.300 | | | |
| | Jumlah | | 13 | 16.146 | 7.631.243.700 | 85 | 20.080 | 11.617.296.500 |

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah Cinomati ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta, dengan biaya pelaksanaan pengadaan tanah Cinomati sebesar Rp.314.456.113,00 Nilai total belanja modal tanah sebesar Rp.11.931.752.613,00 merupakan biaya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi tanah, dalam Kartu Inventaris Barang masih dimasukkan ke dalam Aset Tak Berwujud (ATB). Hal ini disebabkan tanah yang dibebaskan belum ada sertipikatnya, sehingga belum dimasukkan dalam nilai aset tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021. Proses pensertipikatan tanah untuk jalan Cinomati baru dilaksanakan pada Tahun 2022.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hokum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kewajiban Dinas PUPKP pada Tahun Anggaran 2021 adalah Rp.614.970.125,00

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara asset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara asset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp.1.200.264.731.498,09

Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Neraca Tahun 2020 dapat disajikan sepeti pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2020 - 2021

| Uraian | Jumlah (dalam rupiah) | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| | 31-Des-21 | 31-Des-20 | | |
| Aset | | | | |
| Aset lancar | 17.382.813.011,09 | 12.425.901.055,18 | | |
| Aset tetap | 1.169.102.348.695,80 | 1.138.500.934.361,11 | | |
| Aset lainnya | 14.394.539.916,20 | 5.026.961.674,40 | | |
| Jumlah aset | 1.200.879.701.623,09 | 1.155.953.797.090,69 | | |
| | | | | |
| Kewajiban | | | | |
| Kewajiban jangka pendek | 614.970.125 | 1.061.646.432 | | |
| | | | | |
| Ekuitas dana | | | | |
| Ekuitas | 1.200.264.731.498,09 | 1.154.892.150.658,69 | | |
| Jumlah kewajiban dan ekuitas dana | 1.200.879.701.623,09 | 1.155.953.797.090,69 | | |

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan operasional disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrua lyaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima ataudikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Bantul, 31 Desember 2021

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD PER REKENING JENIS

TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE: 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

SATKER: 1.03.1.04.0.00.01.00

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

| | | Pagu Anggaran — | Jumlah Realisasi (Rp.) | | | Lebih / (Kurang) | |
|---------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Kode Rekening | Uraian | | S/D Periode Lalu | Periode Ini | Total | (Rp.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6 - 3 | 8 = 6 : 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.427.592.500,00 | 0,00 | 3.134.984.776,00 | 3.134.984.776,00 | (292.607.724,00) | 91,46 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.427.592.500,00 | 0,00 | 3.125.660.486,00 | 3.125.660.486,00 | (301.932.014,00) | 91,19 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 | 9.324.290,00 | 9.324.290,00 | 9.324.290,00 | 0,00 |
| 1 | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 3.427.592.500,00 | 0,00 | 3.134.984.776,00 | 3.134.984.776,00 | (292.607.724,00) | 91,46 |
| 5 | BELANJADAERAH | | | | | | |
| 5.1 | BELANJAOPERASI | 46.462.288.634,00 | 0,00 | 43.816.130.488,00 | 43.816.130.488,00 | (2.646.158.146,00) | 94,30 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.214.732.536,00 | 0,00 | 10.481.616.855,00 | 10.481,616.855,00 | (733.115.681,00) | 93,46 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.204.002.498,00 | 0,00 | 23.507.485.133,00 | 23.507.485.133,00 | (1.696.517.365,00) | 93,27 |
| 5.1.05 | Belanja Hisah | 10.043.553.600,00 | 0,00 | 9.827.028.500,00 | 9.827.028.500,00 | (216.525.100,00) | 97,84 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | BELANJAMODAL | 119.452.807.047,00 | 0,00 | 111.538.326.858,00 | 111.538.326.858,00 | (7.914.480.189,00) | 93,37 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 17.455.500.000,00 | 0,00 | 11.931.752,613,00 | 11.931.752.613,00 | (5.523.747.387,00) | 68,36 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 558.010.000,00 | 0,00 | 529.943.396,00 | 529.943.396,00 | (28.066.604,00) | 94,97 |
| 5.2.03 | Belanja Mdal Gedung den Bangunan | 7.905.799.294,00 | 0,00 | 7.617.394.500,00 | 7.617.394.500,00 | (288.404.794,00) | 96,35 |
| 5.2.04 | Belanja Mcdal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 93.533.497.753,00 | 0,00 | 91.459.236.349,00 | 91.459.236.349,00 | (2.074.261.404,00) | 97,78 |
| | JUMLAH BELANJA DAERAH | 165.915.095.681,00 | 0,00 | 155.354.457.346,00 | 155.354.457.346,00 | (10.560.638.335,00) | 93,63 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (162.487.503.181,00) | 0,00 | (152.219.472.570,00) | (152.219.472.570,00) | 10.268.030.611,00 | 93,68 |

| | | | Jumlah Realisasi (Rp.) | | | Lebih / (Kurang) | |
|---------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Kode Rekening | Uralan | Pagu Anggaran | S/D Periode Lalu | Periode Ini | Total | (Rp.) | % |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6 - 3 | 8 = 6 : 3 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (162,487.503.181,00) | 0,00 | (152.219.472.570,00) | (152.219.472.570,00) | 10.268.030.611,00 | 93,68 |

Bantul 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Bobot Ariff Aidin, S.T., M.T. NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL NERACA SKPD

PER: 31 DESEMBER 2021

SATKER: DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

SUB UNIT: UNIT INDUK

| No | Uraian | Jumlah |
|---------|---|---|
| 1 | ASET | |
| 11 | ASET LANCAR | *************************************** |
| 111 | Kas dan Setara Kas | 0,00 |
| 11101 | Kas di Kas Daerah | 0,00 |
| 11102 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 |
| 11103 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 |
| 11104 | Kas di BLUD | 0,00 |
| 11105 | Kas di Bendahara BOS | 0,00 |
| 11107 | Kas di Pengelola Dana Bergulir | 0,00 |
| 11108 | Kas di Bendahara Blockgrant | 0,00 |
| 11109 | Kas di KPU dan Panwas | 0,00 |
| 112 | Investasi Jangka Pendek | 0,00 |
| 11201 | Investasi Jangka Pendek | 0,00 |
| 113 | Piutang | 95.220.930,85 |
| 11301 | Piutang Pajak | 0,00 |
| 1130101 | Piutang Pajak (Bruto) | 0,00 |
| 1130102 | Penyisihan Piutang Pajak | 0,00 |
| 11302 | Piutang Retribusi | 95.220.930,85 |
| 1130201 | Piutang Retribusi (Bruto) | 122.600.733,85 |
| 1130202 | Penyisihan Piutang Retribusi | (27.379.803,00) |
| 11303 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 |
| 1130301 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 |
| 11304 | Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah | 0,00 |
| 1130401 | Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto) | 0,00 |
| 1130402 | Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah | 0,00 |
| 114 | Belanja Dibayar Dimuka | 123.751.427,13 |
| 11401 | Belanja Dibayar Dimuka | 123.751.427,13 |
| 11501 | Piutang Lainnya | 0,00 |
| 1150101 | Piutang Lainnya (Bruto) | 0,00 |
| 1150102 | Penyisihan Piutang Lainnya | 0,00 |
| 11601 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 0,00 |
| 11701 | Piutang Lain-lain | 0,00 |
| 119 | Persediaan | 17.163.840.653,11 |
| 11901 | Persediaan | 17.163.840.653,11 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 17.382.813.011,09 |
| 12 | INVESTASI JANGKA PANJANG | |
| 12201 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 |
| 12202 | Investasi Permanen Lainnya | 0,00 |
| | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 |
| 13 | ASET TETAP | |

| No | Uraian | Jumlah |
|-------|--|--|
| 131 | Tanah | 408.358.704.950,00 |
| 13101 | Tanah | 408.358.704.950,00 |
| 132 | Peralatan dan Mesin | 14.894.950.333,00 |
| 13201 | Peralatan dan Mesin | 14.894.950.333,00 |
| 133 | Gedung dan Bangunan | 110.062.016.346,00 |
| 13301 | Gedung dan Bangunan | 110.062.016.346,00 |
| 134 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.281.529.758.595,44 |
| 13401 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.281.529.758.595,44 |
| 135 | Aset Tetap Lainnya | 313.986.357,00 |
| 13501 | Aset Tetap Lainnya | 313.986.357,00 |
| 136 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 |
| 13601 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 |
| 137 | Akumulasi Penyusutan | (1.646.057.067.885,64) |
| 13701 | Akumulasi Penyusutan | (1.646.057.067.885,64) |
| | JUMLAH ASET TETAP | 1.169.102.348.695,80 |
| 15 | ASET LAINNYA | - Investment and the second se |
| 15101 | Tagihan Penjualan Angsuran | 0,00 |
| 15201 | Tagihan Jangka Panjang | 0,00 |
| 153 | Aset Tak Berwujud | 14.214.489.916,20 |
| 15301 | Aset Tak Berwujud | 22.592.627.006,00 |
| 15306 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (8.378.137.089,80) |
| 154 | Aset Lain-lain | 0,00 |
| 15401 | Aset Lain-lain | 0,00 |
| 155 | Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya | 180.050.000,00 |
| 15501 | Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya | 180.050.000,00 |
| 15501 | JUMLAH ASET LAINNYA | 14.394.539.916,20 |
| | | 1.200.879.701.623,09 |
| | JUMLAH ASET | 1.200.079.701.623,09 |
| 2 | KEWAJIBAN | |
| 21 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| 211 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 |
| 21101 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 |
| 21201 | Utang Bunga | 0,00 |
| 21301 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 |
| 21401 | Pendapatan Diterima Dimuka | 588.750.000,00 |
| 215 | Utang Belanja | 26.220.125,00 |
| 21501 | Utang Belanja | 26.220.125,00 |
| 21601 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 |
| 21602 | Utang Uang Jaminan | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 614.970.125,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 614.970.125,00 |
| 3 | EKUITAS | |
| 31 | EKUITAS | |
| 311 | Ekuitas | 1.200.264.731.498,09 |
| | JUMLAH EKUITAS | 1.200.264.731.498,09 |

SEPAK@T BPPT Hal 2 / 3

| No | Uraian | Jumlah |
|----|------------------------------|----------------------|
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 1.200.879.701.623,09 |

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Bobot Ariffi Ardin, S.T., M.T. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL LAPORAN OPERASIONAL

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE:

01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

HAL: 1/5

| No | Uraian | Tahun 2021 | |
|-------------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 7 | PENDAPATAN DAERAH-LO | | |
| 7.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 3.659.110.620,00 | |
| 7.1.02 | Retribusi Daerah-LO | 3.178.786.330,00 | |
| 7.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum-LO | 160.145.800,00 | |
| 7.1.02.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO | 21.857.500,00 | |
| 7.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO | 21.857.500,00 | |
| 7.1.02.01.10 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO | 138.288.300,00 | |
| 7.1.02.01.10.0001 | Retribusi Rumah Tangga-LO | 138.288.300,00 | |
| 7.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha-LO | 1.642.534.594,00 | |
| 7.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 1.642.534.594,00 | |
| 7.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan-LO | 1.627.574.594,00 | |
| 7.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO | 14.960.000,00 | |
| 7.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 1.376.105.936,00 | |
| 7.1.02.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO | 1.376.105.936,00 | |
| 7.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO | 1.376.105.936,00 | |
| 7.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah-LO | 480.324.290,00 | |
| 7.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 471.000.000,00 | |
| 7.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD-LO | 471.000.000,00 | |
| 7.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD-LO | 471.000.000,00 | |
| 7.1.04.13 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO | 9.324.290,00 | |
| 7.1.04.13.01 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO | 125.790,00 | |
| 7.1.04.13.01.0010 | Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO | 125.790,00 | |
| 7.1.04.13.02 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO | 9.198.500,00 | |
| 7.1.04.13.02.0001 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 9.198.500,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO | 3.659.110.620,00 | |
| 8 | BEBAN DAERAH | | |
| 8.1 | BEBAN OPERASI | 38,693,721,412,69 | |
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 10.481.616.855,00 | |
| 8.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 6.736.378.262,00 | |
| 8.1.01.01.01 | Beban Gaji Pokok ASN | 5.009.100.200,00 | |
| 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS | 5.009.100.200,00 | |
| 8.1.01.01.02 | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 545.956.594,00 | |
| 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS | 545.956.594,00 | |
| 8.1.01.01.03 | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 260.790.000,00 | |
| 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS | 260.790.000,00 | |
| 8.1.01.01.04 | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 9.800.000,0 | |
| 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS | 9.800.000,00 | |
| 8.1.01.01.05 | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 197.300.000,0 | |
| 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 197.300.000,0 | |
| 8.1.01.01.06 | Beban Tunjangan Beras ASN | 323.934.660,0 | |

| No | No Uraian | |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS | 323,934,660,00 |
| 8.1.01.01.07 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 12.124.554,00 |
| 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 12.124.554,00 |
| 8.1.01.01.08 | Beban Pembulatan Gaji ASN | 67.300,00 |
| 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 67.300,00 |
| 8.1.01.01.09 | Beban luran Jaminan Kesehatan ASN | 336.127.412,00 |
| 8.1.01.01.09.0001 | Beban luran Jaminan Kesehatan PNS | 336.127.412,00 |
| 8.1.01.01.10 | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 10.294.332,00 |
| 8.1.01.01.10.0001 | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 10.294.332,00 |
| 8.1.01.01.11 | Beban luran Jaminan Kematian ASN | 30.883.210,00 |
| 8.1.01.01.11.0001 | Beban luran Jaminan Kematian PNS | 30.883.210,00 |
| 8.1.01.02 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 3.520.243.593,00 |
| 8.1.01.02.05 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 3.520.243.593,00 |
| 8.1.01.02.05.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 3.520.243.593,00 |
| 8.1.01.03 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 224.995.000,00 |
| 8.1.01.03.07 | Beban Honorarium | 224.995.000,00 |
| 8.1.01.03.07.0001 | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 177.420.000,00 |
| 8.1.01.03.07.0002 | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 47.575.000,00 |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 18.382.937.348,87 |
| 8.1.02.01 | Beban Barang | (2.723.414.222,00) |
| 8.1.02.01.01 | Beban Barang Pakai Habis | (2.723.414.222,0 |
| 8.1.02.01.01.0001 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 171.360.000,00 |
| 8.1.02.01.01.0002 | Beban Bahan-Bahan Kimia | 38.395.750,00 |
| 8.1.02.01.01.0004 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 715.674.887,00 |
| 8.1.02.01.01.0009 | Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 0,00 |
| 8.1.02.01.01.0012 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 90.054.850,00 |
| 8.1.02.01.01.0013 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 30.895.750,00 |
| 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 154.676.750,00 |
| 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 52.757.400,00 |
| 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 267.864.400,00 |
| 8.1.02.01.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 18.097.000,00 |
| 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- | (9.296.500,00) |
| 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 16,295,000,00 |
| 8.1.02.01.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 49.448.400,00 |
| 8.1.02.01.01.0036 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 190.830.300,00 |
| 8.1.02.01.01.0037 | Beban Obat-Obatan-Obat | 10.442.991,00 |
| 8.1.02.01.01.0038 | Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | (365.700,00 |
| 8.1.02.01.01.0039 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | (6.576.178.703,11 |
| 8.1.02.01.01.0040 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.984.108.203,11 |
| 8.1.02.01.01.0043 | Beban Natura dan Pakan-Natura | (530,968,550,00 |
| 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 409.900.000,00 |
| 8.1.02.01.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 7.978.550,00 |

| No | Uraian | Tahun 2021 |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1.02.01.01.0054 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 2.060.000,00 |
| 8.1.02.01.01.0058 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 111.030.000,00 |
| 8.1.02.01.01.0069 | Beban Pakaian Teknik | 38.025.000,00 |
| 8.1.02.01.01.0076 | Beban Pakaian Olahraga | 33,500,000,00 |
| 8.1.02.02 | Beban Jasa | 6.328.787.197,87 |
| 8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor | 4.717.405.193,00 |
| 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 157.750.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0004 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 39.450.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0006 | Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 358.800.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0016 | Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 72.000.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0021 | Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 820.800.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0024 | Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 130.014.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0026 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 1.041.200.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0029 | Beban Jasa Tenaga Ahli | 184.500.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 302.400.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0031 | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 495.900.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir | 72.200.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0035 | Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 144.400.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0045 | Beban Jasa Pelayanan Kearsipan | 198.385.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0046 | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 56.787.500,00 |
| 8.1.02.02.01.0051 | Beban Jasa Pengolahan Sampah | 1.508.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0052 | Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 198.438.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 2.294.000,00 |
| 8.1.02.02.01.0059 | Beban Tagihan Telepon | 1.345.245,00 |
| 8.1.02.02.01.0060 | Beban Tagihan Air | 352.200.000,0 |
| 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik | 33.182.478,00 |
| 8.1.02.02.01.0062 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 10.988.000,0 |
| 8.1.02.02.01.0063 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 9,151,170,0 |
| 8.1.02.02.01.0067 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 20.906.800,0 |
| 8.1.02.02.01.0071 | Beban Lembur | 12.805.000,0 |
| 8.1.02.02.02 | Beban luran Jaminan/Asuransi | 16.067.700,0 |
| 8.1.02.02.02.0006 | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 7,141.200,0 |
| 8.1.02.02.02.0007 | Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 8.926.500,0 |
| 8.1.02.02.03 | Beban Sewa Tanah | 38.118.304,8 |
| 8.1.02.02.03.0025 | Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi | (73.751.427,13 |
| 8.1.02.02.03.0032 | Beban Sewa Tanah Lapangan PBB | 111.869.732,0 |
| 8.1.02.02.04 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 9.940.000,0 9.940.000,0 |
| 8.1.02.02.04.0123 | Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | - |
| 8.1.02.02.05 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 227.850.000,0 227.850.000,0 |
| 8.1.02.02.05.0009 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | . 227.850.000,0 |

| No | Uraian | Tahun 2021 | |
|-------------------|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 3.1.02.02.08.0005 | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 49.417.000,00 | |
| 3.1.02.02.08.0019 | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 24.574.000,00 | |
| 3.1.02.02.09 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 1.118.185.000,00 | |
| 3.1.02.02.09.0011 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei | 933.825.000,00 | |
| 3.1.02.02.09.0014 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus | 184.360.000,00 | |
| 3.1.02.02.12 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 127.230.000,00 | |
| 3.1.02.02.12.0001 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 120.110.000,00 | |
| 3.1.02.02.12.0002 | Beban Sosialisasi | 6.600.000,00 | |
| 3.1.02.02.12.0003 | Beban Bimbingan Teknis | 520.000,00 | |
| 3.1.02.03 | Beban Pemeliharaan | 6.610.751.448,00 | |
| 3.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 370.321.141,00 | |
| 3.1.02.03.02.0012 | Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 98.709.000,00 | |
| 3.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 66.851.141,00 | |
| 8.1.02.03.02.0037 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan | 27.763.500,00 | |
| 8.1.02.03.02.0038 | Berang Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 18.213.500,00 | |
| 3.1.02.03.02.0039 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 1.500.000,00 | |
| 3.1.02.03.02.0117 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 75.324.000,00 | |
| 8.1.02.03.02.0118 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 8.965.000,00 | |
| 3.1.02.03.02.0405 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 43.896.500,00 | |
| 8.1.02.03.02.0406 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 29.098.500,00 | |
| 8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 678.911.522,00 | |
| 8.1.02.03.03.0001 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 678.911.522,00 | |
| 8.1.02.03.04 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.561.518.785,00 | |
| 8.1.02.03.04.0003 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten | 3.884.041.000,00 | |
| 8.1.02.03.04.0026 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi | 1.515.786.785,00 | |
| 8.1.02.03.04.0069 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor | 43.120.000,00 | |
| 8.1.02.03.04.0071 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor | 118.571.000,00 | |
| 8.1.02.04 | Beban Perjalanan Dinas | 174.684.985,0 | |
| 8.1.02.04.01 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 174.684.985,00 | |
| 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 4.330.000,00 | |
| 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 99.230.000,00 | |
| 8.1.02.04.01.0005 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 71,124.985,0 | |
| 8.1.02.05 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 7.992.127.940,0 | |
| 8.1.02.05.01 | Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 7.861.000.000,0 | |
| 8.1.02.05.01.0005 | Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 7.861.000.000,0 | |
| 8.1.02.05.02 | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 131.127.940,0 | |
| 8.1.02.05.02.0001 | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 83.800.000,0 | |
| 8.1.02.05.02.0002 | Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 47.327.940,0 | |
| 8.1.05 | Beban Hibah | 9.827.028.500,0 | |
| 8.1.05.01 | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 1.786.411.000,0 | |
| 8.1.05.01.02 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 1.786.411.000,0 | |
| 8.1.05.01.02.0001 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 1.786.411.000,0 | |

| No | Uraian | Tahun 2021 |
|-------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1.05.04 | Beban Hibah Uang kepada BUMD | 5.223.629.500,00 |
| 8.1.05.04.02 | Beban Hibah Barang kepada BUMD | 5.223.629.500,00 |
| 8.1.05.04.02.0001 | Beban Hibah Barang kepada BUMD | 5.223.629,500,00 |
| 8.1.05.05 | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 2.816.988.000,00 |
| 8.1.05.05.01 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan | 2.816.988.000,00 |
| 8.1.05.05.01.0001 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 250.000.000,00 |
| 8,1.05.05.01.0002 | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.566.988.000,00 |
| 8.1.07 | Beban Penyisihan Piutang | 2.138.708,82 |
| 8.1.07.02 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 2.138.708,82 |
| 8.1.07.02.03 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu | 2.138.708,82 |
| 8.1.07.02.03.0001 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 2.138.708,82 |
| 8.2 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 94.179.357.833,16 |
| 8.2.01 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1.535.219.411,57 |
| 8.2.01.02 | Beban Penyusutan Alat Angkutan | 1.535.219.411,57 |
| 8.2.01.02.01 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor | 1.535.219.411,57 |
| 8.2.01.02.01.0009 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 1.535.219.411,57 |
| 8.2.02 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 2.171.072.955,12 |
| 8.2.02.01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung | 2.171.072.955,12 |
| 8.2.02.01.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 2.171.072.955,12 |
| 8.2.02.01.01.0007 | Beban Penyusutan Bangunan Oseanarium/Observatorium | 2.171.072.955,12 |
| 8.2.03 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 86.750.212.695,27 |
| 8.2.03.01 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 86.750.212.695,27 |
| 8.2.03.01.01 | Beban Penyusutan Jalan | 86.750.212.695,2 |
| 8.2.03.01.01.0003 | Beban Penyusutan Jalan Kabupaten | 86.750.212.695,27 |
| 8.2.06 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 3.722.852.771,20 |
| 8.2.06.01 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 3.722.852.771,20 |
| 8.2.06.01.01 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 3.722.852.771,20 |
| 8.2.06.01.01.0004 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software | 3.722.852.771,20 |
| | JUMLAH BEBAN DAERAH | 132.873.079.245,85 |
| | SURPLUS / DEFISIT LO | (129.213.968.625,85) |

Bantul, 31 Desember 2021

Bobot Ariffi Aidin, S.T., M.T. NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

SATKER: DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

| NO | URAIAN | 2021 | 2020 |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | EKUITAS AWAL | 1.154.892.150.658,69 | 1.192,672,316,755,33 |
| 2 | SURPLUS DEFISIT -LO | (129.213.968.625,85) | (114.179.690.113,46) |
| 3 | ASET/EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN | 152.219.472.570,00 | 84.378.012.294,96 |
| 31 | R/K SKPD | 0,00 | 84.378.012.294,96 |
| 32 | R/K PPKD | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | 22.367.076.895,25 | (7.978.488.278,14) |
| 41 | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0,00 | 0,00 |
| 42 | SELISIH EVALUASI ASET TETAP | 0,00 | 0,00 |
| 43 | KOREKSI EKUITAS LAINNYA | 22.367.076.895,25 | (7.978.488.278,14) |
| | EKUITAS AKHIR | 1.200.264.731.498,09 | 1.154.892.150.658,69 |

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Bobot Ariffi Aidin, S.T., M.T. 196906191996031003

Hal 1 / 1